

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi inklusi keuangan.

Inklusi keuangan atau *financial inclusion* menurut World Bank dan European Commission adalah suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan dalam segi harga maupun non harga yang menghalangi masyarakat terhadap akses layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan atau *financial inclusion* merupakan respon terhadap *financial exclusion* yang hanya memberikan keuntungan untuk segelintir pihak (Perdana, 2016).

Menurut Demirguc-kunt *et al.* (2014) inklusi keuangan tidak hanya sekedar akses ke sektor keuangan formal (*access to finance*). Inklusi keuangan berfokus pada penggunaan jasa keuangan. Kurangnya penggunaan jasa keuangan tidak selalu bermakna kurangnya akses terhadap keuangan. Hal itu karena banyak orang yang tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan akibat biaya jasa keuangan yang mahal, terhambat persyaratan dokumen yang rumit, jarak yang jauh ataupun hambatan lainnya. Namun, banyak juga individu yang tidak terlibat jasa keuangan meskipun memiliki akses dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat juga meningkatkan partisipasi individu agar dapat menjangkau dan menggunakan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhannya.

Bank Indonesia menyebutkan, kebijakan keuangan inklusif merupakan suatu bentuk layanan jasa keuangan yang mendalam (*deepening financial service*) yang lebih berorientasi pada masyarakat *in the bottom of pyramid* agar mampu memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana penyimpanan uang yang aman (*keeping*), layanan kredit, asuransi maupun transfer. Masyarakat *in the bottom of pyramid* di negara berkembang didominasi oleh individu berpendapatan rendah, berpendidikan rendah, dan rentan sebagai kelompok masyarakat yang susah mengakses layanan keuangan formal. Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan keuangan inklusif tidak saja dengan cara menyediakan produk yang sesuai tapi juga dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Inklusi keuangan merupakan proses bagi seluruh lapisan masyarakat agar memiliki akses yang berkesinambungan terhadap jasa keuangan yang dibutuhkan atau sebuah proses untuk menyediakan layanan jasa keuangan kepada masyarakat luas agar dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga berpenghasilan rendah pada harga yang terjangkau. Menurut Demirguc-Kunt (2015) sistem keuangan eksklusif mendorong individu atau rumah tangga terpaksa menggunakan tabungannya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya, melakukan investasi atau memulai usaha baru, sedangkan untuk perusahaan, hanya dapat mengandalkan keuntungan usaha yang diperoleh untuk meningkatkan produksinya. Kondisi tersebut akan

mendorong ketimpangan distribusi pendapatan dan memperlambat proses pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan inklusi keuangan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Inklusi keuangan yang baik bermula dari sistem keuangan yang mampu dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem keuangan yang baik adalah sistem keuangan yang terstruktur secara efisien antara pasar keuangan dan lembaga keuangan intermediari, seperti pasar modal dan bank komersial, sebagai poros utama yang menstimulus perkembangan ekonomi. Seiring dengan kenaikan jumlah pengusaha, keberadaan pasar keuangan dan lembaga keuangan intermediari juga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas menjadi acuan bagi institusi keuangan formal yang mengembangkan jangkauan layanan melalui pembiayaan ataupun jasa keuangan lainnya.

Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga dipengaruhi oleh reformasi kelembagaan keuangan formal dalam usahanya memperluas akses metode pembayaran dan layanan perbankan lainnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain mendukung penggunaan layanan dan produk jasa perbankan yang digunakan mayoritas penduduk meliputi pemberian bunga dan bagi hasil usaha, mempermudah kredit, dan memberikan fasilitas pendukung untuk mempermudah transaksi (Xu, 2019).

Semakin baik kualitas bank komersial dan pasar keuangan maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Hal ini

karena lembaga keuangan mampu menjadi perantara alokasi dana pihak ketiga yang optimal guna mendorong kegiatan bisnis produktif. Dengan demikian, peningkatan kualitas operasional lembaga keuangan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, dengan meningkatkan manajemen resiko, meningkatkan likuiditas aset untuk nasabah dan mengurangi biaya jasa keuangan, bank dapat menstimulasi investasi produktif dalam kegiatan ekonomi.

2. Indikator inklusi keuangan.

Inklusi keuangan erat kaitannya dengan keberhasilan dalam mewujudkan perekonomian yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam inklusi keuangan, beberapa indikator utama pengukurannya berdasarkan kepemilikan akun, probabilitas menabung di sektor formal dan probabilitas meminjam dari sektor formal.

a. Kepemilikan akun.

Memiliki akun formal merupakan langkah awal keterlibatan individu di sektor keuangan formal. Dengan akun formal, seseorang dapat menggunakan jasa keuangan formal sesuai kebutuhan. *The Global Findex 2017* mendefinisikan kepemilikan akun yaitu memiliki rekening di lembaga keuangan atau melalui penyedia jasa *mobile money*. Rekening di lembaga keuangan formal meliputi kepemilikan rekening di perbankan atau lembaga keuangan lainnya seperti koperasi, lembaga mikro, *credit union*, dan produk lain. Di sini lain, layanan *mobile money* berbasis internet mayoritas digunakan untuk

membayar tagihan, melakukan pembayaran, mengirim atau menerima uang antar bank maupun dari bank yang sama.

Individu atau non perorangan yang namanya tertera dalam nama rekening formal bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban dari rekening tersebut. Rekening dinyatakan aktif setelah disetujui oleh pihak bank/penerbit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga tersebut.

Memiliki rekening di lembaga keuangan formal memungkinkan pemilik akun mengelola dana dengan lebih aman dan efisien. Selain itu, dengan memiliki rekening formal, pemilik akun dapat memanfaatkan jasa pinjaman yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

b. Menabung di sektor formal.

Menabung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menabung yaitu kegiatan menyimpan uang di celengan, pos, bank atau tempat lainnya. Menabung dimaksudkan untuk motif berjaga dan sebagai dana cadangan yang dapat digunakan saat terjadi kondisi darurat. Kemampuan seseorang dalam menabung sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi yang dilakukan. Konsumsi berbanding terbalik dengan tabungan.

Global Findex 2017 mengkategorikan menabung di sektor formal yaitu individu yang menyimpan dana atau asetnya di perbankan atau di sektor keuangan formal lainnya.

Salah satu teori konsumsi, JM Keynes, menyebutkan bahwa tingkat menabung individu dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Rasio konsumsi terhadap pendapatan atau kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) turun ketika pendapatan naik, hal itu terlihat dalam kurva konsumsi Keynes yang melengkung. Keynes menganggap bahwa tabungan merupakan suatu hal yang mewah sehingga Keynes meyakini orang kaya menabung dengan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka dibandingkan orang miskin. Fungsi konsumsi Keynes ditulis sebagai berikut:

$$C = \bar{C} + bY, \bar{C} > 0, 0 < b < 1 \dots\dots\dots (1)$$

Konsumsi disimbolkan dengan huruf C, sedangkan Y adalah pendapatan disposibel, \bar{C} adalah konstanta, dan b adalah *marginal propensity to consume* (MPC) atau pertambahan konsumsi seseorang akibat pendapatan yang diterimanya.

$$MPC = \partial C / \partial Y, 0 < MPC < 1 \dots\dots\dots (2)$$

Jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar daripada tambahan pendapatan disposabel, sehingga angka MPC tidak akan lebih besar dari satu. Angka MPC juga tidak mungkin negatif karena jika pendapatan disposabel terus meningkat, konsumsi akan terus dilakukan hingga titik nol (tidak mengkonsumsi karena pendapatan

habis). Sebab manusia tidak mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal.

Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal (*Marginal Propensity to Consume*) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. (Mankiw, 2006).

Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*Average Propensity to Consume*) disingkat APC adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposabel total.

$$APC = cYd \dots\dots\dots(3)$$

Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, APC, turun ketika pendapatan naik. Pendapatan disposabel yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung. Berikut persamaan yang terbentuk:

$$Yd = C + S \dots\dots\dots(4)$$

Dimana:

S = tabungan (saving)

Setiap tambahan penghasilan disposabel akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Besarnya tambahan pendapatan disposabel yang menjadi tambahan tabungan disebut kecenderungan menabung marjinal (*Marginal Propensity to Save*). Sedangkan rasio antara tingkat tabungan dengan pendapatan

disposabel disebut kecenderungan menabung rata-rata (*Average Propensity to Save*). Jika setiap tambahan pendapatan disposabel dialokasikan sebagai tambahan konsumsi dan tabungan, maka:

$$\delta Yd = \delta C + \delta S \dots \dots \dots (5)$$

Jika kedua sisi persamaan dibagi dengan δYd maka:

$$\frac{\delta Yd}{\delta Yd} = \frac{\delta C}{\delta Yd} + \frac{\delta S}{\delta Yd}$$

$$1 = MPC + MPS \text{ atau } MPS = 1 - C \dots \dots \dots (6)$$

Dengan demikian, disimpulkan bahwa nilai total MPC ditambah MPS sama dengan satu. Pada saat pendapatan disposabel masih rendah, setiap unit tambahan pendapatan sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi. Nilai MPC mendekati satu dan nilai MPS mendekati nol. Hal ini dapat menjelaskan mengapa di negara-negara miskin kemampuan menabungnya sangat rendah, sehingga bila mereka ingin melakukan investasi terpaksa meminjam dari luar negeri. Umumnya dana pinjaman tersebut berasal dari negara-negara kaya, yang nilai MPC-nya sudah makin mengecil, sementara MPS-nya makin besar.

c. Meminjam di sektor formal.

Menurut KBBI, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Meminjam di sektor formal menurut pengukuran Global Findex 2017 yaitu individu yang menggunakan jasa kredit dari

perbankan atau lembaga lain di sektor keuangan formal dalam 12 bulan terakhir.

Salah satu tujuan umum orang melakukan pinjaman adalah untuk membeli tanah atau rumah, yang merupakan investasi keuangan terbesar yang banyak orang lakukan dalam hidup mereka.

Dalam pemberian kredit ada beberapa hal yang diperhatikan antara lain prinsip 5C. Hal ini bertujuan untuk mencegah kredit macet dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kreditur. Gunarsih (2008) menguraikan prinsip 5C tersebut sebagai berikut:

- (1) *Character*; pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan bahwa debitur memiliki watak yang baik, bertanggung jawab sebagai manusia, masyarakat dan sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) *Capacity*; yaitu calon debitur dianggap mampu melunasi kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan formal.
- (3) *Capital*; yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- (4) *Collateral*; yaitu aset yang diserahkan debitur sebagai jaminan pinjaman.
- (5) *Condition of economy*; yaitu kondisi perekonomian, sosial, politik yang sedang terjadi dan dapat mempengaruhi keputusan pemberian kredit.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan.

Semenjak krisis ekonomi tahun 2008, inklusi keuangan menjadi salah satu topik yang masif diperbincangkan di kalangan praktisi maupun akademisi. Pada krisis tersebut, individu yang berada di *bottom of the pyramid* skema kegiatan ekonomi makro, yaitu masyarakat yang berpendapatan rendah, berpenghasilan rendah, dan kurang infrastruktur menjadi kelompok yang mengalami kerugian. Masyarakat yang berada di kelompok terbawah dalam piramid ekonomi secara kuantitas ada dalam jumlah besar, lebih besar dari kelompok di atasnya. Kelompok *in the bottom of pyramid* secara kuantitas jumlah kekayaan hanya menguasai sebagian kecil dari total kekayaan global. Masyarakat yang berada di *bottom of the pyramid* umumnya tidak menggunakan layanan keuangan formal atau *unbanked*. Banyak hal yang membuat individu terlogong *unbanked*, antara lain:

a. Gender.

Gender secara bahasa merupakan konstruksi sosial terhadap peran individu berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya. Laki-laki dan perempuan merupakan gender yang disepakati masyarakat. Terdapat kelompok masyarakat yang menganut garis keturunan berdasarkan gender, seperti di masyarakat Minang yang menganut garis keturunan ibu (matriarki) dan masyarakat di Batak menganut garis keturunan ayah (patriarki).

Adanya garis keturunan membuat masyarakat memberikan kewenangan pada gender tertentu untuk mengambil keputusan yang berdampak besar bagi individu tersebut ataupun rumah tangganya. Mayoritas, masyarakat menganut garis keturunan patriarki. Meskipun banyak yang beranggapan perempuan dan laki-laki setara, tetapi pada faktanya ketimpangan peran laki-laki dan perempuan masih tergolong tinggi. Laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan. Dalam pengambilan keputusan ekonomi-pun, laki-laki seringkali lebih dominan.

Perempuan cenderung lebih sedikit untuk memiliki rekening formal (*formal account*) atau pinjaman formal (Fungá *et al.*, 2015). Di sisi lain, Zins & Weill (2016) menyebutkan bahwa perempuan secara signifikan lebih rendah partisipasinya dalam penggunaan jasa keuangan formal di Afrika. Namun, di Indonesia, gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan akun formal (Perdana, 2016). Persentase kepemilikan rekening jenis kelamin perempuan sebesar 39,36% dari total sampel, sedangkan persentase jenis kelamin laki-laki sebesar 40,09%. Jumlah presentase tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup besar pada kepemilikan rekening oleh seorang laki-laki maupun perempuan di Indonesia. Tentu hal ini berbeda dari temuan Fungá *et al.* (2015) serta Zins & Weill (2016) yang menyatakan bahwa jenis kelamin berpengaruh

signifikan terhadap probabilitas kepemilikan rekening di China dan Afrika.

Penelitian lain dilakukan oleh Cabeza-garcía *et al.* (2019), partisipasi perempuan dalam penggunaan jasa keuangan formal lebih rendah daripada laki-laki dan hal ini semakin mendorong perempuan berada di kelas kedua dan termarginalkan secara gender. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Nugroho & Purwanti, 2018; Ajani & Tjahjadi, 2018; Morsy & Youssef, 2017). Adanya ketimpangan gender dalam penggunaan jasa keuangan formal akan mendorong ketimpangan distribusi pendapatan dan berdampak negatif dalam pembangunan berkelanjutan.

b. Pendidikan.

Salah satu faktor determinan inklusi keuangan adalah tingkat pendidikan individu. Pendidikan berkorelasi positif dengan kepemilikan rekening (Fungá *et al.*, 2015). Masyarakat China yang berpendidikan menengah (*secondary education*) dan pendidikan tinggi (*tertiary education*) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepemilikan rekening formal. Koefisien masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih besar dibandingkan yang berpendidikan di bawahnya. Pendidikan juga memiliki hubungan dengan *formal credit* dimana untuk pendidikan tinggi berpengaruh

signifikan dan positif. Namun, pendidikan tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa *formal saving* di China.

Penelitian lain disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh pada semua indikator inklusi keuangan Zins & Weill (2016) dan Nugroho & Purwanti (2018). Koefisien pendidikan signifikan positif terhadap kepemilikan akun, *formal saving*, dan *formal credit*. Angka koefisien semakin tinggi pada masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka semakin tinggi pula probabilitasnya untuk memiliki rekening, menabung, dan meminjam di lembaga keuangan formal.

c. Pendapatan

Pendapatan menjadi salah satu determinan inklusi keuangan (Fungá *et al.*, 2015). Dalam penelitian ini, individu yang berada dalam tiga kelompok pendapatan terendah (*poorest20%*, *second20%*, dan *middle20%*) memiliki arah koefisien negatif terhadap kepemilikan akun formal. Responden yang berpendapatan lebih tinggi (*fourth20%* dan *richest20%*) signifikan positif terhadap kepemilikan akun formal. Hasil ini sejalan dengan temuan (Demirguc-kunt *et al.*, 2014) bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar kesempatannya terlibat dalam inklusi keuangan. Namun, Fungá *et al.* (2015) memiliki hasil berbeda untuk dua indikator inklusi keuangan lainnya dimana

pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas menabung (*formal saving*) dan probabilitas meminjam (*formal credit*) di China.

Presentase kepemilikan akun formal meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Presentase kepemilikan akun penduduk berpendapatan tinggi jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang berpendapatan di bawahnya. Selain itu, persentase tidak memiliki rekening semakin tinggi pada tingkat pendapatan yang semakin rendah (Abel *et al.*, 2018). Variabel tingkat pendapatan bertanda negatif dan signifikan yaitu individu dengan pendapatan (*poorest20%*, *second20%*, *middle20%*, *fourth20%*) yang berarti bahwa tingkat pendapatan tersebut mempunyai probabilitas lebih kecil untuk memiliki rekening perbankan dibandingkan dengan tingkat pendapatan tinggi (*richest20%*).

Tingkatan pendapatan di negara berkembang umumnya mengalami ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin. Secara global, manfaat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang lebih banyak dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya, sedangkan 80% penduduk lainnya lebih sedikit mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi (Sarma, 2015).

Tingkat pendapatan menjadi acuan dalam pengelompokan suatu negara. World Bank menggunakan metode Atlas untuk mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan perkapita. Metode Atlas menggunakan GNI *current* US\$ sebagai acuan. Berikut tabel pengelompokan negara menurut metode Atlas:

TABEL 2. 1.

Pengelompokan Negara Berdasarkan Pendapatan Perkapita

Klasifikasi Negara	Pendapatan (GNI perkapita)
<i>Low income</i>	< \$ 1,025
<i>Lower middle</i>	\$ 1,026 - \$ 3,995
<i>Upper middle</i>	\$ 3,996 - \$ 12,375
<i>High income</i>	>\$12,375

Sumber: Fantom, N., 2016.

World Bank juga membagi penduduk menjadi 3 kelompok sesuai tingkatan pendapatan yaitu 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk pendapatan menengah dan 20% pendapatan tinggi. Perdana (2016) menjelaskan, menurut kriteria World Bank Gopal Findex, dari ketiga kelompok tingkat pendapatan penduduk tersebut di bagi lagi menjadi lima kelompok atau kuantil (*quantile*) sehingga akan diperoleh kuantil q1, q2, q3, q4 dan q5. Kelompok tingkat pendapatan penduduk terdiri dari 40% penduduk dengan pengeluaran terendah (q1 *poorest20%* dan q2 *second20%*), 40% penduduk dengan pengeluaran menengah (q3 *middle20%* dan q4 *fourth20%*), serta *richest20%* sebagai penduduk dengan pengeluaran

tertinggi. World Bank juga mengelompokkan ketimpangan penduduk berdasarkan distribusi pendapatan.

Berkaitan dengan kepemilikan akun formal, secara global, gap antara individu kaya dan miskin yang tercatat sebagai pengguna rekening formal di negara berpendapatan tinggi sebesar 13%. Di negara berkembang, angka ketimpangan kepemilikan akun antara individu kaya dan miskin lebih tinggi yaitu sebesar 20% (Demirgüç-kunt, 2017).

d. Status kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bekerja adalah melakukan kegiatan minimal satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh ataupun membantu mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Dalam hal ini, pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk individu yang bekerja. Menurut Abel *et al.* (2018) orang yang bekerja akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam layanan keuangan formal. Secara global, di negara berkembang maupun di negara berpendapatan tinggi, proporsi kepemilikan akun di sektor formal, keterlibatan menabung dan meminjam di institusi keuangan formal dibandingkan dengan individu yang tidak bekerja. Pekerja lebih berpeluang menjadi pengguna jasa keuangan formal dibandingkan pengangguran di India (Nandru *et al.*, 2016).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Inklusi keuangan menjadi pembahasan menarik dalam dunia akademisi. Berbagai penelitian dilakukan untuk menambah khasanah keilmuan dan menjadi kontribusi bagi perekonomian yang lebih unggul.

Sarma (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Measuring Financial Inclusion*" menggunakan metode indeks inklusi keuangan (IFI) yang ditemukannya. Penelitian ini fokus pada pengukuran indeks dengan notasi 0-1. Angka 1 didefinisikan keuangan yang inklusif, dan 0 eksklusif, sehingga semakin mendekati 1 maka semakin inklusif sistem keuangan di suatu wilayah. Sarma menggunakan 3 dimensi untuk mengukur inklusi yaitu dimensi penetrasi, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penggunaan. Dimensi penetrasi mengukur seberapa besar populasi yang menggunakan rekening yang diwakili oleh jumlah akun deposit bank per 1000 orang dewasa. Dimensi keterjangkauan mengukur aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas fisik perbankan yang direpresentasikan oleh jumlah ATM per 100.000 orang dewasa. Sedangkan dimensi penggunaan mengukur manfaat dari berbagai layanan perbankan (kredit, deposit, pembayaran, remiten, transfer, dll). Namun, karena keterbatasan data maka Sarma menggunakan volume kredit dan deposit per GDP. Sarma menggunakan data sekunder dari *Financial Access Survei* IMF. Berikut hasil penelitian terhadap beberapa negara di tahun 2010:

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa negara-negara di Eropa relatif lebih inklusif dibandingkan negara di regional lain. Pada peringkat 5 besar diraih

oleh negara Luxembourg (0.996), Cyprus* (0.974), United Kingdom (0.949), Korea Selatan (0.922), Jepang* (0.920), sedangkan negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah relatif lebih eksklusif.

Penelitian lain dilakukan oleh (Aina and Oluyombo, 2014) tentang inklusi keuangan di Nigeria. Dalam penelitian ini mengukur indeks inklusi keuangan berdasarkan aksesibilitas dan penggunaan. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui keberadaan bank belum maksimal dalam melayani jasa keuangan karena dalam jarak 1 km bank hanya melayani beberapa nasabah. Di sisi lain, keterbatasan dokumen menjadi salah satu hambatan utama yang membuat individu tidak menggunakan layanan keuangan formal.

Xu (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Trust and Financial Inclusion: A Cross Country Study*” menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap institusi keuangan menjadi faktor yang signifikan mempengaruhi keputusan individu menggunakan layanan keuangan formal. Kepercayaan memiliki asosiasi yang kuat terhadap kualitas perekonomian di suatu negara. Sedangkan ketidakpercayaan terhadap institusi keuangan akan memperburuk laju pertumbuhan ekonomi. Xu (2019) menggunakan data Global Financial Index 2014 dan 6th Wave of World Values Survey 2011-2014 yang diolah menggunakan metode OLS dan regresi probit. Hasil penelitiannya tingkat kepercayaan terhadap institusi keuangan sangat menentukan individu untuk bersedia menggunakan jasa keuangan formal. Keuangan yang inklusif dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, sehingga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan formal.

Penelitian lain dilakukan oleh Tjahjadi (2018) mengenai pengaruh faktor demografi terhadap keterlibatan pemuda institusi keuangan formal di ASEAN. Penelitian ini membandingkan sisi *demand* (pemuda) dan *supply* (perbankan) jasa keuangan. Data yang digunakan yaitu Global Findex 2014 dengan variabel dependen inklusi keuangan dan variabel independen meliputi jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan regulasi. Hasil dinyatakan dalam notasi antara 0-1, nol untuk keuangan eksklusif dan satu untuk keuangan inklusif. Perempuan dan laki-laki muda (15-34 tahun) lebih inklusif daripada yang lebih tua (>35 tahun), meski demikian, secara umum laki-laki lebih inklusif. Dari level pendidikan, orang dewasa yang berpendidikan dasar dan menengah lebih inklusif dari pemuda, tetapi pada level pendidikan atas justru pemuda lebih inklusif daripada orang dewasa. Selain itu, dari faktor pendapatan, pemuda yang miskin, menengah ke atas dan kaya lebih inklusif. Sedangkan, pemuda di kelompok pendapatan menengah dan menengah ke bawah partisipasinya lebih rendah dalam jasa keuangan formal.

Faktor lain yang membuat pemuda tidak memiliki akun rekening antara lain faktor keagamaan, ketidakpercayaan pada institusi keuangan formal, biaya jasa keuangan mahal, jarak akses perbankan jauh, persyaratan dokumen, merasa tidak membutuhkan layanan keuangan, anggota lain di keluarga telah memiliki akun, dan kekurangan dana untuk disimpan (pendapatan rendah).

Abel *et al.* (2018) meneliti tentang determinan inklusi keuangan Zimbabwe. Metode pengukuran menggunakan metode logit dan probit. Penelitian ini menemukan bahwa variabel independen meliputi usia, pendidikan,

literasi keuangan, pendapatan, dan internet berpengaruh positif terhadap variabel dependen inklusi keuangan. Di sisi lain, variabel independen persyaratan dokumen, biaya layanan mahal, dan jarak yang jauh ke bank berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan.

Efobi *et al.* (2014) melakukan penelitian tentang tingkat inklusi akses dan penggunaan jasa keuangan di Nigeria. Data yang digunakan merupakan data mikro *World Bank Household Survey 2011* dan diolah menggunakan metode regresi tobit dan logistik. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepemilikan akun, penggunaan akun keuangan untuk menabung, dan frekuensi penarikan kembali dana (*withdrawals*). Variabel independen meliputi gender (perempuan, laki-laki), pendapatan (*poorest20%*, *second20%*, *middle20%*, *fourth20%* dan *richest20%*), pendidikan (dasar, menengah, atas), dan kepemilikan kartu kredit. Hasil menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan pendidikan memiliki hubungan positif signifikan terhadap variabel dependen. Partisipasi perempuan lebih rendah daripada laki-laki dalam menggunakan jasa keuangan formal. Usia berpengaruh terhadap inklusi keuangan, tetapi tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara penduduk usia muda dan dewasa dalam menggunakan layanan perbankan.

Selanjutnya, Ajani & Tjahjadi (2018) melakukan pengukuran inklusi keuangan negara-negara di ASEAN, kecuali Brunei Darussalam dan Laos. Dalam penelitian ini menggunakan data mikro *Global Findex 2014*. Fokus penelitian yaitu efektifitas program pendorong inklusi keuangan bagi penduduk berpendidikan dasar, penduduk miskin, dan perempuan. Metode logistik dipilih

sebagai alat analisis. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepemilikan akun, sedangkan variabel independen terbagi menjadi dua :

1. Variabel independen karakteristik individu meliputi usia, gender, pendapatan, dan pendidikan.
2. Variabel independen penyebab tidak memiliki akun rekening meliputi persyaratan dokumen, biaya layanan jasa keuangan mahal, jarak relatif jauh menuju bank, dan ketidakpercayaan terhadap institusi keuangan formal.

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi perempuan dalam menabung di perbankan 2% lebih rendah dibandingkan laki-laki, kelompok miskin 20% juga rendah kesempatan partisipasi dibandingkan kelompok pendapatan lain (menengah ke bawah, menengah, menengah atas, dan kaya). Faktor anggota lain di keluarga yang telah memiliki akun rekening dan jauhnya jarak yang harus ditempuh menuju bank menjadi hambatan utama (30% dan 40%) seseorang tidak memiliki akun perbankan. Di wilayah ASEAN, negara Singapura, Malaysia, dan Kamboja menjadi negara yang paling berhasil memberikan layanan keuangan inklusif bagi perempuan, kelompok miskin, dan masyarakat berpendidikan dasar.

Morsy & Youssef (2017) meneliti tentang inklusi keuangan yang dihubungkan dengan faktor gender. Variabel dependen meliputi 6 aspek individu dalam menggunakan akun formal yaitu:

1. Kepemilikan akun di institusi keuangan formal
2. Menggunakan akun untuk bisnis

3. Kepemilikan kartu kredit dan kartu debit
4. Menggunakan akun untuk menerima gaji
5. Menabung di institusi keuangan formal dalam setahun terakhir
6. Meminjam di institusi keuangan formal dalam setahun terakhir

Variabel independen meliputi *Herfindahl-Hirschman Index (HHI)*, *Depth of Credit Information Index (CII)*, *Strenght of Legal Rights Index (LR)*, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, total partisipan tenaga kerja, kepemilikan akun perbankan, kepemilikan kartu kredit dan debit, menggunakan akun bank untuk menabung dan meminjam, serta menggunakan akun bank untuk menerima gaji. Data yang digunakan merupakan data mikro Bankscope data *World Bank Doing Business Project*, *World Development Indicators (WDI)*, serta *The Global Findex 2011*. Untuk analisis data menggunakan metode *Weighted Least Square*.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perempuan menjadi kelompok marginal dalam institusi keuangan formal. Hukum dan norma yang berlaku di masyarakat cenderung mendiskrimasi perempuan, hal itu berlaku pula di pasar tenaga kerja. Partisipasi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki sehingga perempuan cenderung tidak bekerja dan tidak terakses inklusi keuangan. Temuan lainnya yaitu bank milik negara memiliki andil besar dalam sistem perbankan, sehingga diperlukan kebijakan khusus untuk meningkatkan akses lembaga keuangan formal bagi perempuan.

Zins & Weill (2016) melakukan penelitian tentang inklusi keuangan di 37 negara di wilayah Afrika. Hasil penelitian dianalisis menggunakan model regresi probit. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui menjadi laki-laki, orang yang lebih kaya dan lebih berpendidikan dapat meningkatkan peluang dalam inklusi keuangan. Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan maka semakin tinggi pendapatan yang diterima individu. Hal itu secara tidak langsung akan memotivasi individu untuk menggunakan jasa keuangan formal yang lebih memberikan keamanan dan manfaat bagi penggunanya. Penggunaan mobile banking dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor yang memengaruhi penggunaan perbankan konvensional. Perempuan di Afrika lebih cenderung menyimpan dana secara informal. Namun, dalam hal kredit, perempuan cenderung tidak menggunakan jasa kredit formal maupun informal. Tingkat pendidikan juga berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa menabung formal.

Fungá *et al.* (2015) melakukan penelitian tentang inklusi keuangan di China pada tahun 2014 dan dibandingkan dengan negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Data yang digunakan adalah data Global Findex 2011 dan dianalisis menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian diketahui inklusi keuangan China cukup tinggi didorong oleh kepemilikan akun formal dan tabungan yang lebih besar daripada negara anggota BRICS lainnya. Namun, penduduk China lebih rendah dalam menggunakan jasa kredit formal. Mayoritas penduduk China meminjam uang melalui keluarga atau rekan. Di China, laki-laki, individu dengan pendidikan dan pendapatan yang

lebih tinggi dan usia yang lebih tua lebih berpeluang menggunakan jasa keuangan formal. Berdasarkan penelitian ini, tingkat inklusi keuangan di China sudah cukup baik, tetapi tantangan datang dari penggunaan kredit formal yang masih rendah yang berpengaruh bagi pengembangan perekonomian nasional.

Selanjutnya, Susilowati (2019) meneliti tentang inklusi keuangan di Indonesia dan dibandingkan dengan inklusi keuangan di Singapura, Malaysia dan Thailand. Dalam penelitian ini menggunakan data mikro Global Findex 2014 dan dianalisis menggunakan regresi logistik probit untuk melihat probabilitas keterlibatan individu dalam menggunakan jasa keuangan formal. Hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik individu (gender, pendidikan, pendapatan, usia) berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan di empat negara tersebut.

Responden miskin, perempuan, berpendidikan rendah dan berpendapatan rendah lebih sedikit kesempatannya untuk mengakses keuangan formal. Dalam penelitian ini juga diketahui motivasi individu dalam menyimpan uang yaitu sebagai simpanan hari tua dan investasi di sektor bisnis atau pertanian, sedangkan motivasi dalam menggunakan kredit formal yaitu untuk pengembangan usaha, pendidikan dan biaya kesehatan (Susilowati, 2019).

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka berupa landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan teori dan

kerangka pemikiran yang ada, maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut:

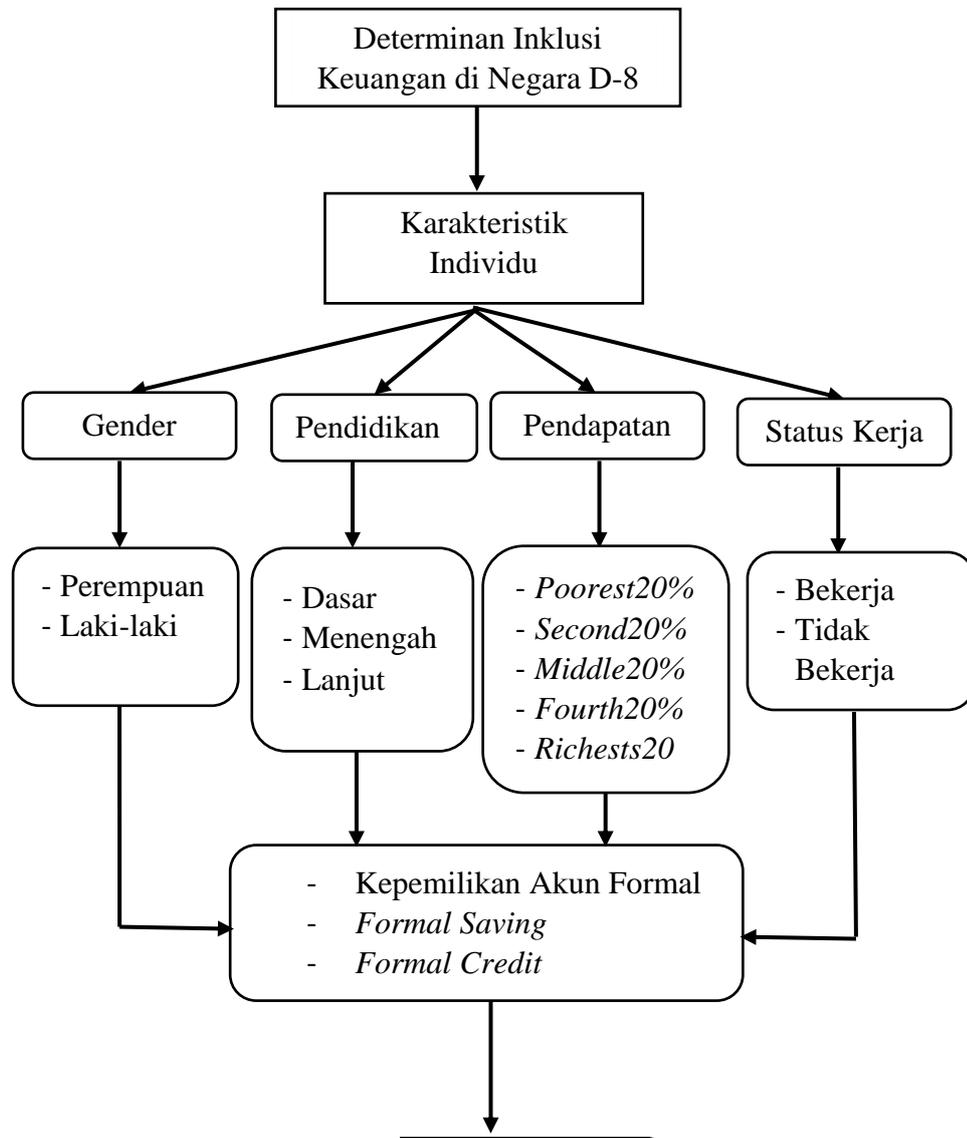
1. Diduga secara bersama-sama gender, latar belakang pendidikan, tingkat pendapatan, status kerja berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan akun formal, menabung di sektor keuangan dan kredit formal.
2. Diduga secara parsial gender berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan akun formal, menabung di sektor keuangan dan kredit formal.
3. Diduga secara parsial latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap kepemilikan akun formal, menabung di sektor keuangan dan kredit formal.
4. Diduga secara parsial tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepemilikan akun formal, menabung di sektor keuangan dan kredit formal.
5. Diduga secara parsial status kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kepemilikan akun formal, menabung di sektor keuangan dan kredit formal.

D. Model Penelitian

Model penelitian ini menggambarkan kerangka pemikiran determinan inklusi keuangan di negara anggota D-8. Tiga indikator utama dalam mengukur inklusi keuangan meliputi tingkat kepemilikan akun formal, menabung di sektor keuangan dan kredit formal.

Disisi lain, banyak hal yang mempengaruhi individu terlibat sebagai pengguna jasa keuangan formal, antara lain gender, latar belakang pendidikan,

tingkatan pendapatan, dan status sebagai pekerja. Dengan demikian, model dalam penelitian ini sebagai berikut:



GAMBAR 2.1.

Model Penelitian

